

Transformasi dari Politik Jarak Jauh ke Politik Identitas di Gerakan Surah Buku Yogyakarta

Muhyi Atsarissalaf

Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: muhyiatsarissalaf@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang transformasi gerakan politik diaspora Aceh yang ada di Yogyakarta. Dengan mengambil komunitas Gerakan Surah Buku, artikel ini menguatkan argumen Missbach (2012) bahwa politik jarak jauh diaspora Aceh telah bergeser ke politik identitas, artinya politik jarak jauh diaspora tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami perubahan-perubahan. Posisi artikel ini kemudian mencoba untuk menunjukkan perubahan-perubahan tersebut melalui penelitian etnografi di salah satu komunitas literasi yaitu Gerakan Surah Buku, Yogyakarta. Artikel ini menunjukkan bahwa wujud politik identitas, bukan hanya efek dari bergesernya politik jarak jauh, melainkan telah menjadi artikulasi alternatif dan kreatif dari bentuk-bentuk sisa-sisa gerakan politik jarak jauh diaspora Aceh yang ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode auto-etnografi, yaitu sebuah metode penelitian yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam jangka waktu yang lama. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana identitas etnis yang mengalami pergumulan di wilayah diaspora telah membentuk kultur hibrida dalam mengartikulasikan isu-isu yang sedang menjadi tren dalam gerakan aktivisme kaum muda, seperti hak asasi, perdamaian, keadilan dan kebebasan.

Kata Kunci: Politik, Politik Identitas, Gerakan Sosial, Diaspora, Anak Muda

Abstract

This article discusses the transformation of the Aceh diaspora political movement in Yogyakarta. By taking the community of Gerakan Surah Buku, this article strengthens Missbach's (2012) argument that the long-distance politics of the Acehnese diaspora has shifted to identity politics, meaning that the long-distance politics of the diaspora has not completely disappeared, but has undergone changes. The position of this article then tries to show these changes through ethnographic research in one of the literacy communities, Gerakan Surah Buku, Yogyakarta. This article shows that the form of identity politics is not only the effect of the shift of long-distance politics, but has become an alternative and creative articulation of the remnants of the previous Acehnese diaspora long-distance political movement. This research uses auto-ethnography, a research method that allows researchers to be directly involved for a long period of time. The article also shows how ethnic identities that are struggling in the diaspora have formed a hybrid culture in articulating trending issues in youth activism movements, such as human rights, peace, justice and freedom.

Keywords: Politics, Identity Politics, Social Movements, Diaspora, Youth

PENDAHULUAN

Artikel ini mengkaji tentang identitas politik kaum muda dan diaspora dengan studi kasus pada Gerakan Surah Buku Yogyakarta. Artikel ini melanjutkan penelitian yang telah ada sebelumnya, terutama penelitian Anjete Missbach yang membahas tentang politik jarak jauh diaspora Aceh pasca konflik. Beberapa sarjana telah mencatat bahwa MoU Helsinki tahun 2005 silam merupakan pintu gerbang menuju Aceh Baru. Hal ini paling tidak dibuktikan dengan perubahan dalam perjuangan politik GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Selama 25 tahun GAM telah menempuh jalur gerakan perlawanan, terutama perlawanan terbuka atau dalam istilah lain disebut juga gerakan separatisme. Namun kemudian, gerakan separatisme tersebut berubah menuju perjuangan melalui partai politik. Hal ini menandakan bahwa bagi

beberapa aktor GAM yang menyetujui MoU Helsinki, Aceh telah kembali menjadi bagian dari Indonesia. Berdirinya Partai Aceh dan beberapa partai lokal lainnya merupakan bukti dari perubahan ini.

Salah satu alasan kuat mengapa kemudian gerakan politik separatisme yang digunakan GAM berubah menjadi gerakan politik damai yaitu bencana alam. Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 sebelumnya, telah mendorong titik balik bagi perjuangan GAM. Dalam beberapa catatan, bencana alam yang menimpa Aceh sekaligus memberikan pukulan bagi perjuangan-pejuang GAM. Untuk melancarkan masukkan bantuan kemanusiaan dari negara-negara luar, akhirnya aktor-aktor GAM harus segera memastikan bahwa Aceh telah damai (Bustamam-Ahmad, 2014; Djuli, 2018). Ditandatangani MoU Helsinki oleh pihak RI dan GAM secara tidak langsung telah memberi pengaruh pada bentuk diaspora Aceh itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Missbach, pada periode sebelum MoU Helsinki, alasan utama orang Aceh bermigrasi keluar negeri atau hanya keluar daerah adalah situasi konflik di Aceh. Namun demikian, bukan berarti politik jarak jauh telah hilang sepenuhnya, melainkan telah bertransformasi menjadi politik identitas (Missbach, 2012).

Dalam artikel ini saya ingin melanjutkan diskusi Missbach tersebut. Saya tertarik untuk menjawab pertanyaan, bagaimana wujud transformasi gerakan politik jarak jauh ke politik identitas di kalangan mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Untuk itu, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi wawancara dan percakapan saya dengan informan. Fadli merupakan seorang anggota Gerakan Surah Buku juga sekjen KMPAN (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara) 2019-2022. Ia berbagi cerita terkait surat yang dilayangkannya pada CMI (Crisis Management Initiative), sebuah organisasi yang bergerak dalam monitoring perdamaian Aceh-RI. Dalam surat yang juga ditujukan pada Martti Ahtisaari selaku mediator MoU Helsinki tersebut, Fadli mempertanyakan monitoring perdamaian di Aceh pasca MoU. Balasan dalam surat tersebut mengabarkan bahwa Ahtisaari sudah pensiun. Bagi Fadli pensiunnya Martti Ahtisaari dari jabatannya sebagai presiden CMI menandakan bahwa Ahtisaari telah selesai dengan permasalahan Aceh. Tatkala saya menanyakan, mengapa dia menyurati pihak CMI? Alih-alih mendapat jawaban sebagai wujud untuk melanjutkan perjuangan Aceh merdeka, ia menjawab bahwa hal itu dilakukannya sebagai bentuk kepedulian. “Anak muda tidak boleh abai dengan sejarah. Bagaimana pun kita telah damai. MoU Helsinki telah disepakati. Yang penting sekarang adalah keterlibatan anak muda dalam mengawal perwujudan MoU Helsinki tersebut.” demikian ujarnya.

Demikian pula dengan Nazar. Ia merupakan seorang sarjana Teknik Sipil yang juga aktif di Gerakan Surah Buku. Nazar menceritakan pada saya, bagaimana ia memainkan romantisme dalam menarasikan Aceh dulu dan kini. Saya, baik sengaja maupun secara kebetulan beberapa kali terlibat diskusi mendalam dengannya. Kami membicarakan tentang generasi baru Aceh yang dalam ungkapkannya “menanggung beban sejarah”, sebagai generasi yang selamat dari konflik tetapi “mewarisi” bagaimana narasi kepedihan itu berlangsung. Nazar tidak sendirian, beberapa informan yang lain, seperti Kemul, Maulana, Abiet dan Albar juga mengatakan hal serupa. Hal ini tidak hanya dalam percakapan informal, tetapi juga kerap diungkapkan dalam tulisan-tulisan seperti puisi, film pendek, cerita pendek dan esai, misalnya. Namun demikian, di dalam artikel ini saya tidak akan menguraikan hal tersebut satu persatu, melainkan saya tertarik untuk melihat perwujudan romantisme sejarah dan perlawanan tersebut mereka wujudkan di dalam pola Gerakan Surah Buku itu sendiri.

Lebih lanjut, artikel ini berpendapat bahwa politik jarak jauh tidak sepenuhnya hilang, melainkan telah bertransformasi menjadi politik identitas. Mengapa hal ini menarik untuk dibahas? Salah satu alasannya ialah manakala politik jarak jauh itu tidak hanya dimainkan oleh aktor-aktor lama—diasporan yang sebelum MoU Helsinki 2005 telah ikut terlibat atau minimal mengikuti permasalahan politik Aceh—melainkan dimainkan oleh generasi baru, yaitu diasporan pasca-MoU Helsinki. Selain itu, bagaimana identitas sebagai korban yang samar—apakah mereka korban atau bukan—diucapkan dengan jalur-jalur kesenian, seperti sastra dan seni rupa. Dalam seni rupa, misalnya, lukisan-lukisan Tu-ngang Iskandar mencerminkan bagaimana kenangan konflik Aceh. Yang menarik perhatian adalah, mengapa hal itu justru diproduksi manakala mereka berada di wilayah diaspora? Artikel ini mencoba memahaminya dalam skop romantisme dalam arti bagaimana para diasporan generasi baru Aceh memainkan apa yang terjadi di masa lalu untuk mempertanyakan keadaan masa kini. Hal semacam ini sebenarnya tidak unik dan tidak baru sepenuhnya. Menilik jauh ke belakang, tampaknya Hasan Tiro juga melakukan hal yang serupa. Bagaimana Tiro merekonstruksi sejarah Aceh untuk membangun kesadaran Aceh sebagai sebuah negeri berdaulat (Lihat misalnya, Hamzah, 2015; Ishak, 2013; Sari, 2022). Namun demikian, diskusi dalam artikel ini tidak akan mempermasalahkan kesinambungan ideologi etnonasionalisme Aceh yang digagas oleh Hasan Tiro dengan model perlawanan kaum muda di Gerakan Surah Buku. Akan tetapi, artikel ini hanya untuk sebagai sebuah gambaran bagaimana romantisme menjadi kekuatan perlawanan, khususnya bagi diaspora.

Di dalam artikel pembahasan terbatas hanya untuk menggambarkan bahwa politik jarak jauh diaspora itu masih ada dan tampaknya diwariskan oleh generasi sebelumnya. Diskusi ini tidak membahas apakah hal itu efektif atau tidak. Berangkat dari hal tersebutlah artikel ini tertarik untuk mengkajinya dalam sudut pandang diaspora, secara khusus bagaimana romantisme dibentuk dan membentuk kultur baru bagi diasporan. Tulisan ini terinspirasi dari buku *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh*, Antje Missbach. Manakala mendiskusikan istilah diaspora pada bagian kedua artikel ini, nyaris tidak ada hal yang baru, perdebatannya masih sama dengan perdebatan yang ada dalam buku tersebut, hanya kemudian artikel ini mencoba untuk mempersandingkan istilah diaspora dengan migrasi sirkular. Selanjutnya artikel ini akan membahas konsep diaspora dan hubungannya dengan diaspora Aceh; selain itu artikel ini juga membahas konsep pemuda dan bentuk-bentuk perlawanan Gerakan Suruh Buku; dan terakhir adalah kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Hal ini dipilih untuk merekonstruksi ulang data yang diperoleh baik pada saat penelitian maupun di luar waktu penelitian seperti percakapan-percakapan sekaligus kegiatan-kegiatan *suruh* yang saya ikuti. Kendala utama dalam penelitian ini adalah minimnya tulisan yang membicarakan perantau Aceh di Yogyakarta, itu saya akui sebagai sebuah kekurangan manakala menggunakan diaspora sebagai sebuah pendekatan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Missbach (2012, hlm. 31–41) manakala ia memutuskan untuk meneliti diaspora Aceh, ia telah memikirkan kemungkinan kritik bahwa meneliti diaspora Aceh yang masih sangat muda dengan jumlah diasporan yang relatif sedikit. Apa yang dikatkan oleh Missbach tersebut kemudian di satu sisi meminta saya untuk memikirkan ulang, minimal mengingat skop penelitian dalam artikel ini sangat kecil, terbatas hanya pada komunitas Gerakan Suruh Buku di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diaspora, Romantisisme dan Perlawanan

Pada bagian ini membahas tentang diaspora. Secara sederhana, istilah diaspora sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno: *διασπορά*, ‘penyebaran atau penaburan benih’. Lalu kemudian dipahami dalam konteks persebaran etnis atau bangsa tertentu. Sebagaimana dicatat oleh banyak peneliti, pada mulanya istilah diaspora erat kaitannya dengan komunitas Yahudi, berawal dari pengusirannya dari Babiloina hingga komunitas Yahudi tersebar ke beberapa tempat. Di negara-negara tuan rumah lalu mereka membentuk komunitas diaspora yang mengembangkan kulturennya sendiri yang berbeda dengan kultur negara tuan rumah. Yang paling kentara dan tampaknya inilah yang kemudian menjadikan komunitas diaspora berbeda dengan komunitas yang lain, adalah keinginan untuk kembali pada “kampungan halaman”. Dalam perkembangannya istilah ini tidak lagi identik dengan komunitas Yahudi belaka, karena komunitas-komunitas yang lain juga mengklaim bahwa mereka adalah komunitas diaspora, seperti imigran Afrika dan Armenia, misalnya. Namun, tetap saja yang menjadi ciri utamanya adalah keterusiran dari negara asalnya (Cohen, 1996).

Dalam perkembangan mutakhir, tampaknya tidak ada kategori tunggal untuk melihat suatu komunitas diaspora atau tidak (Missbach, 2012) melainkan telah begitu cair, dan kadang-kadang bergantung pada bagaimana komunitas tersebut membuat klaim, apakah mereka diaspora atau tidak. Sedangkan dalam kerangka teoritis tampaknya Safran dan Cohen mula-mula membuat kerangka konseptual untuk istilah tersebut. Sebagaimana dikutip dari Missbach (2011), William Safran (1991) menawarkan setidaknya ada enam ciri utama apa yang disebut diaspora:

- (1) mereka, atau nenek moyang mereka, telah tersebar dari "pusat" asli tertentu ke dua atau lebih daerah pinggiran, atau asing;
- (2) mereka mempertahankan memori kolektif, visi, atau mitos tentang tanah air asli mereka - lokasi fisik, sejarah, pencapaiannya;
- (3) mereka percaya bahwa mereka tidak, dan mungkin tidak dapat, diterima sepenuhnya oleh masyarakat tuan rumah mereka dan oleh karena itu merasa sebagian terasing dan terisolasi dari masyarakat tersebut;
- (4) mereka menganggap tanah air leluhur mereka sebagai rumah ideal mereka yang sebenarnya dan sebagai tempat di mana mereka atau keturunan mereka akan (atau harus) pada akhirnya akan kembali - jika dan ketika kondisinya sesuai;
- (5) mereka percaya bahwa mereka harus, secara kolektif, berkomitmen untuk mempertahankan atau memulihkan tanah air asli mereka dan untuk keselamatan dan kemakmurannya; dan
- (6) mereka terus berhubungan, secara pribadi atau secara vicarious, dengan tanah air dalam satu dan lain cara, dan kesadaran solidaritas etnokomunal mereka, yang menjangkau lintas batas-batas politik, secara penting ditentukan dalam hal keberadaan semacam itu.

Kerangka tersebut kemudian dimodifikasi oleh Cohen (1996) dengan menolak sebagiannya dan menambahkan kategori yang baru. Kerangka yang ditawarkan Cohen jauh lebih longgar dari pada yang ditawarkan oleh Safran. Dalam membicarakan diaspora Aceh, Missbach tampaknya cenderung pada kerangka yang ditawarkan oleh Cohen.

Antara Migrasi Sirkular atau Diaspora Profesional

Tampaknya cukup penting untuk mengulas mengapa memilih konsep diaspora dari pada istilah yang lain, seperti Missbach juga melakukannya. Hanya yang membedakan adalah istilah yang diperbandingkan. Missbach membandingkan diaspora dengan—setidaknya—tiga istilah yang lain, yaitu ‘ekspatriat’, ‘imigran’ dan ‘ekspatriat’ sedangkan dalam artikel ini mencoba untuk membandingkannya dengan istilah ‘migrasi sirkular’.

Pada dasarnya istilah migrasi sirkular cukup mampu menjelaskan keberadaan mahasiswa Aceh di Yogyakarta, bila hanya dilihat dari motif perpindahan mereka dari kampung halamannya. Minimal ada dua alasan, pertama, mereka berangkat ke Jogja dengan motif pendidikan, dan bukan karena bahwa di tanah air mereka, Aceh, sedang berlangsung konflik seperti tahun-tahun operasi militer. Kedua, mereka dengan cepat pulang-pergi antara Aceh dari/ke Yogyakarta. Rata-rata informan saya pulang minimal dua tahun sekali, seperti pulang saat lebaran dan waktu libur. Namun demikian, agaknya istilah migrasi sirkular ini tidak mampu menampung atau menjelaskan gejala-gejala etnisitas, politik lokal dan hal-hal yang sejalan dengan hal itu yang diekspresikan di wilayah lain.

Dari beberapa informan yang saya wawancarai langsung atau hanya sekedar terlibat dalam perbincangan non-formal, menyebutkan bahwa tujuan mereka ke Yogyakarta adalah untuk tujuan pendidikan. Hal ini jelas bukan sesuatu yang baru, namun dalam lanskap membicarakan diaspora dan secara khusus diaspora Aceh, tampaknya hal ini belum begitu banyak diteliti. Apakah hal ini lantaran istilah diaspora itu sendiri hanya untuk perantau lintas negara? (Missbach, 2012, hlm. 31–38). Ia tidak melakukan penelitiannya di kota-kota Indonesia atas alasan tersebut, yaitu diaspora sebagai perpindahan dan persebaran penduduk lintas negara. Tetapi peneliti yang lain, yang membahas diaspora Jawa, diaspora Papua, diaspora Minang, misalnya, tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan apakah diaspora itu lokal atau lintas negara. Dengan demikian, artikel ini satu sisi melanjutkan argument Missbach, di sisi lain menolak kerangka teori diaspora lintas negara yang ia yakini. Meletakkan Aceh di dalam Indonesia tampaknya akan gagal dalam memahami diaspora-diaspora di wilayah lokal. Bagi beberapa informan, mereka memandang Aceh sebagai sebuah negeri, walaupun pandangan ini pandangan romantisme bukan pandangan politik. Perdebatan-perdebatan tentang negeri itulah yang tidak mampu ditampung oleh migrasi sirkular.

Diaspora Aceh: Membayangkan Ulang dari Politik Jarak Jauh ke Politik Identitas

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, Missbach (2012) pada bagian akhir pembahasannya berargument bahwa politik jarak jauh telah beralih ke politik identitas. Dalam artikel ini mengikuti argumen tersebut, namun dengan pertanyaan bagaimana Missbach mengartikan politik identitas. Ini penting mengingat istilah politik identitas akhir-akhir ini mengalami citra buruk lantaran ia digunakan untuk kepentingan politik praktis dalam arti untuk menunjang elektabilitas partai politik dan juga politikus. Karenanya dalam artikel ini istilah politik identitas yang digunakan memiliki pengertian yang hampir dengan gerakan kebudayaan lokal.

Pada dasarnya, kajian diaspora sudah sangat berkembang, bukan hanya tentang perpindahan penduduk belaka, melainkan hampir segala hal yang menyangkut dengan itu, seperti hubungan diaspora dengan budaya dan agama. Begitupun dengan pendekatan-pendekatan yang ada dalam studi diaspora juga telah menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan antropologi, misalnya. Keragaman dalam studi diaspora ini disatu sisi memang telah menyumbang sudut pandang, tetapi di sisi lain juga telah membuat kabur istilah diaspora itu sendiri. Diaspora tidak lagi identik dengan imigran, penerima suaka politik atau yang sejalan dengan itu, melainkan telah sangat beragam, dimana kadang kala kunjungan wisata juga dapat dilihat sebagai bentuk diaspora itu sendiri (Missbach, 2011).

Temuan penting dari Missbach ketika ia menganalisa politik jarak jauh diaspora Aceh adalah kondisi konflik bukan hanya telah menyebabkan gelombang diaspora ke luar negeri, melainkan juga telah menjadi alasan utama dalam politik jarak jauh. Lalu apa yang terjadi setelah konflik? Apakah diaspora akan berakhir dan diaspora pulang ke kampung halaman? Missbach dalam temuannya, menunjukkan tidak sepenuhnya, melainkan diaspora tetap berlangsung dalam bentuk yang berbeda dengan masa-masa konflik. Bersandar pada temuan Missbach tersebut, dalam arti menekankan pada bentuk diaspora yang berbeda saya akan menganalisa dalam unit yang lebih kecil, yaitu komunitas anak muda Aceh di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan sebuah daerah cukup representatif sebagai tempat diaspora kaum

muda, dimana hampir setiap tahunnya menerima tidak kurang dari sepuluh ribu mahasiswa dari luar daerah.

Bagaimana orang muda diaspora merefleksikan dan mengekspresikan ulang ke-Aceh-annya setelah 15 tahun pasca-MoU Helsinki? Ataukah mereka telah mengabaikannya sama sekali. Tetapi mengapa mereka mengabaikan? Apakah karena narasi MoU di ranah diaspora tidak menjadi isu yang menarik lagi sebagaimana respon diaspora tahun-tahun awal pasca-MoU seperti dalam temuan Mischbach? Asumsi saya, dimana aktor diaspora tidak tetap melainkan terus berubah secara sirkular, telah membentuk narasi diaspora yang unik, dimana mereka mencoba mengambil semangat etnisitas di satu sisi, di sisi lain mereka adalah pemuda yang sedang hidup di wilayah urban seperti Yogyakarta, dimana bukan hanya telah memungkinkan mereka membangun identitas diaspora yang baru, baik dalam bentuk negosiasi dengan identitas urban, maupun dalam bentuk modifikasi identitas rural.

Di dalam artikel ini saya akan mencoba menyajikan bagaimana narasi klaim-korban konflik. Bagaimana mereka mencoba mengkonfigurasi ulang identitas korban mereka. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah studi, Keller Hirsch (2016) menganalisa perbedaan korban langsung dan korban tidak langsung dalam peristiwa Hollocous. Di antara informan saya banyak yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban, walaupun apabila dikaitkan dengan tahun kelahiran rata-rata umur mereka pada saat konflik berlangsung baru 10 tahun atau lebih muda dari itu 5 tahun. Dalam hal inilah tampaknya romantisisme masa lalu itu cukup memberi peran, dimana ingatan masa silam berbaur dengan narasi-narasi kepedihan yang terus saja dibangun. Korban konflik tidak langsung, sebagaimana disebutkan Hirsch memiliki kecenderungan bersuara secara terbuka ketimbang korban langsung. Keduanya memang menanggung beban psikologis yang dalam; korban langsung menanggung kengerian atas apa yang ia saksikan, sedangkan korban tidak langsung menanggung beban moral mengapa ia tidak berada di kejadian tersebut (Hirsch, 2016)

Hal tersebut saya cantumkan dalam kaitannya dengan bagaimana kemudian narasi perlawanan dibangun. Perlawanan tidak hanya kepada otoritas negara (pemerintah pusat) melainkan juga pada pemerintah daerah, dimana elit-elit GAM termasuk di dalamnya. Generasi baru ini seolah sedang mempertanyakan ulang, baik itu keinginan untuk melepaskan diri dari cengkraman Republik, maupun realisasi keadilan yang menjadi kesepakatan dalam MoU. Mereka, generasi baru ini, tampaknya tidak pada posisi mendukung perdamaian atau pro-kemerdekaan, melainkan mereka berada pada posisi lain. Kecenderungan aktivisme dalam generasi baru ini ialah mempertanyakan kegagalan demi kegagalan yang terus mereka saksikan, mempertanyakan kembali komitmen perdamaian.

Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa gerakan politik jarak jauh diaspora telah berubah ke politik identitas termasuk di dalamnya adalah identitas budaya asli (kampung halaman) yang mengalami negosiasi dengan identitas baru (identitas urban), karenanya pada bagian selanjutnya saya menunjukkan bagaimana warisan budaya *Surah Kitab* di Aceh dikemas oleh diasporan menjadi *Surah Buku*. Perubahan dari kitab ke buku ini saya baca dalam sudut pandang perbauran identitas. Saya akan menampilkan beberapa kegiatan yang relevan dengan konteks pergeseran politik jarak jauh diaspora ke gerakan kebudayaan. Mulai dari kegiatan mingguan “*surah buku*” hingga kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti aksi demonstrasi, pertunjukan dan yang lainnya. Berhubungan dengan hal tersebut, sebuah tulisan yang cukup menarik dari Kaya (2002) bagaimana aktor-aktor muda diaspora membangun identitas etnis di satu sisi dan menegosiasikannya dengan identitas baru yang ia peroleh selama di wilayah diaspora.

Gerakan Surah Buku: Anak Muda dan Modifikasi Budaya

Pada bagian ini mendiskusikan terminologi pemuda. Setidaknya ada tiga kategori yang berkembang dalam mendiskusikan pemuda, yaitu pemuda sebagai generasi, pemuda sebagai transisi dan pemuda sebagai pencipta dan konsumen (Naafs & White, 2012). Lantaran keragaman dalam klaim atau definisi anak muda kiranya artikel ini mendiskusikannya dalam klaim kemudaan (Ruiz Herrera & Bayat, 2010) Apa yang ditawarkan Bayat, Secara sederhana dan sempang yang dapat saya pahami, bahwa tidak ada satu corak khusus atau tunggal yang menjadi tanda sebagai alat identifikasi pemuda atau bukan, melainkan hal ini sangat bergantung pada bagaimana mereka mengklaim diri mereka sebagai pemuda, dan tentu saja, klaim ini tidak harus dan tidak hanya dapat dimaknai menjadi “pemuda ideal” belaka, melainkan sangat bergantung pada aktor-aktor mendefinisikan.

Hal tersebut dapat membantu memahami bagaimana informan-informan saya memberikan klaim atas kemudaan mereka. Hal ini menjadi penting, sebagaimana dikatakan oleh Bayat, bahwa “Pemuda”, baru kemudian dipandang memiliki peran manakala ia mencoba untuk beralih dari pemuda kategori usia menjadi pemuda dalam kategori sosial. Pada apa yang kita sebut terakhir inilah kemudian akan meletakkan diskusi saya tentang pemuda. Mengikuti apa yang ditawarkan oleh Bayat, artikel ini akan mencoba menganalisa apa artinya menjadi muda bagi para informan saya.

Lantaran saya mengambil studi lapangan di salah satu komunitas di Yogyakarta, karenanya membahas Yogyakarta sebagai kota pelajar tampaknya tidak dapat diabaikan. Ada beberapa alasan, hal ini menjadi penting untuk sedikit membicarakan perbedaan mahasiswa dengan pemuda, yang pada akhirnya nanti akan mengerucut pada diskusi gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda. Walaupun rasanya membuat perbedaan ini dalam konteks membicarakan diaspora tergolong sulit, mengingat rata-rata tujuan mahasiswa dari daerah lain ke Yogyakarta adalah untuk melanjutkan studi. Dalam mana mereka melanjutkan studi tersebutlah kemudian mereka menjalin hubungan dengan mahasiswa yang seadanya dengan mereka, dan kemudian membentuk identitas diaspora. Di sinilah kemudian terjadi pertimbangan, di antara meletakkannya sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda. Sebenarnya pertimbangan ini cukup mudah untuk diatasi bila kita mengabaikan gerakannya. Misalnya, bahwa mereka mahasiswa dapat dilihat dari kartu identitasnya, sedangkan mereka sebagai pemuda sebagai kategori umur. Namun, itu tidak akan banyak berguna manakala diterapkan untuk menganalisa kegiatan-kegiatan yang mereka adakan. Dalam konteks membicarakan Gerakan Surah Buku, apakah karena aktor tersebut rata-rata mahasiswa sehingga dapat disebut gerakan mahasiswa ataukah hal tersebut lebih cocok dimasukkan dalam gerakan pemuda yang dimainkan oleh mahasiswa. Agaknya pada yang disebutkan terakhir tersebutlah artikel ini mengambil posisi.

Dari Surah Kitab ke Surah Buku

Penelitian sebelumnya yang menjadikan Gerakan Surah Buku sebagai objek penelitiannya adalah Munawwarah, (2020) dan Maulana (2022), kedua tulisan tersebut sama-sama menekankan pada praktik literasi. Meskipun sama-sama meneliti Gerakan Surah Buku, yang membedakan adalah lokasi penelitian, dimana Munawwarah mengambil lokasi penelitiannya di Kamp Biawak, Limpok, Aceh Besar, sedangkan Maulana mengambil di Yogyakarta. Saya akan lebih banyak merujuk pada Maulana mengingat lokasi penelitian saya sama dengannya. Kedua tulisan tersebut tetap menjadi sumbangan yang amat berharga sebagai batu pijakan minimal untuk mengenal Gerakan Surah Buku.

Penelitian Maulana, misalnya, menekankan pada internalisasi budaya literasi bagi mahasiswa, dimana Gerakan Surah Buku dipandang sebagai sebuah ruang alternatif untuk menciptakan iklim literasi yang menyenangkan, dengan mengambil konsep *surah kitab* yang umum dipraktikkan di dayah atau pesantren-pesantren di Indonesia, dimana seorang *teungku* membacakan kitab kata demi-kata lantas kemudian menjelaskannya, baik dari gramatikalnya (nahwu dan sarf) maupun penjelasan tentang maksud kalimat tersebut (*syarah*). Sedangkan murid atau santri mendengarkan sembari memberi baris pada kitab yang mereka miliki. Metode ini, di pesantren Jawa dikenal dengan *bandongan* atau *sorogan*. Namun di GSB istilah *surah* tidak lagi mengacu pada bacaan teks kitab kuning, melainkan pada buku-buku umum. Dalam penelitian Maulana menunjukkan buku-buku yang *disurah* di GSB Yogyakarta, mulai *Madilog*; *Alam Pikiran Yunani*; *Sejarah Intelektual*; hingga yang terakhir *Socrates Express*. Selain dari *menyurah* buku (teks), GSB juga melakukan serangkaian kegiatan lain, namun tetap membubuhkan istilah *surah*, seperti *Surah Damai*, *Surahameh*, *Surah Film*, *Surah Luwa*, *Surah Musik*, *Surah Politik*, *Surah Aceh*.

Dari Teungku ke Pensyurah: Dari Otoritas Tunggal ke Otoritas Demokratis

Selain pada perubahan dari kitab ke buku, perubahan orang yang memiliki otoritas untuk *menyurah* juga menjadi penting. Dimana di lokasi asalnya, dayah-dayah Aceh, otoritas untuk *menyurah* menjadi otorita *tengku* (ulama lokal) dan biasanya tetap sesuai dengan keilmuan *tengku* tersebut. Sedangkan hal yang berbeda terjadi di *surah buku*, selain tidak ada otoritas tertentu untuk *menyurah* dalam arti *pensurah* dapat berubah-ubah tidak harus mengerti tentang buku tersebut, melainkan fungsinya lebih ditekankan pada yang membacakan dengan suara yang keras. Dalam pengamatan saya, kerap yang membacakan buku tersebut adalah mereka yang baru bergabung dengan Gerakan Surah Buku, hal ini bertujuan untuk melatih keberanian untuk tampil di depan. Hal ini biasanya untuk kegiatan rutin setiap malam Sabtu.

Sedangkan pada saat-saat tertentu, seperti dalam *surah damai*, misalnya. Metode *surah* sebagaimana yang telah kita jelaskan dibagian sebelumnya tidak berlaku sama sekali. Istilah *surah* hanya menjadi simbol atau dapat dikatakan sebagai brand saja. *Surah Damai* lebih pada model diskusi publik, dimana ada pembicara yang dipandang memiliki kapasitas untuk membicarakan hal itu. Manakala saya mengikuti *Surah Damai*, saya menangkap kesan bahwa hal itu sebagai bentuk peringatan MoU Helsinki. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada pembicara umumnya mengenai perwujudan point-point dalam MoU Helsinki, tidak jarang pertanyaan tersebut dilontarkan dengan nada sinis, misalnya, “MoU hanya hitam di atas putih, tetapi gagal dalam kenyataannya”.

Pada saat itu yang menjadi topik pembahasan adalah gagalnya pembentukan KKR Aceh (Komisi Kebenaran dan Rekonstruksi), dimana MoU dipandang tidak benar-benar dipraktikkan untuk hal ini. Esok

harinya, satu hari setelah berlangsung diskusi tersebut, para mahasiswa diasporan diantaranya anggota Gerakan Surah Buku menggelar akasi damai menuntut untuk merealisasikan KKR Aceh.

Dari Santri ke Peserta Surah: dari Pendengar ke Partisipan

Perubahan dari santri ke peserta surah pada dasarnya tidak jauh berbeda dari perubahan yang terjadi para perubahahan sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena istilah pensurah dipakai fleksibel, baik sebagai pembaca buku, seperti yang biasanya terjadi pada saat agenda rutin surah malam sabtu, atau untuk menyebut pembicara seperti dalam momen-momen tertentu seperti *Surah Damai*. Berubahnya dari santri ke peserta surah juga penting untuk diamati, karena istilah santri kadang-kadang dilekatkan dengan statusnya sebagai anggota dalam suatu dayah, sedangkan anggota surah buku tampaknya lebih fleksibel. Siapa yang disebut sebagai anggota juga tidak terlalu jelas, melainkan hal tersebut berlangsung secara kultural saja. Lantaran intensitas partisipasinya dengan kegiatan *Surah Buku* kemudian ia dipandang sebagai anggota.

Lantaran model keanggotaan yang longgar ini kemudian memungkinkan dalam beberapa kegiatan tidak hanya diisi oleh orang-orang dengan latar belakang Aceh, melainkan dari daerah-daerah lainnya. Hal ini mirip dengan cara-cara diaspora membangun jaringan untuk meminta perhatian Internasional (Missbach, 2012), hanya untuk konteks diaspora lokal dan konteksnya komunitas kecil, sehingga jaringan antar komunitas dapat dilihat sebagai repertoarnya.



Gambar 1. Suasana Kelas Gerarkan Surah Buku

Dari Balee Beut ke Kelas Surah: Sebuah Perubahan Tentang Ruang

Perubahan ruang juga menjadi hal yang penting, dari *balee beut* ke kelas surah. Balee Beut, balai tempat mengaji biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar agama di dayah-dayah di Aceh. Hal ini berbeda dengan kelas surah dengan fungsi yang tidak terbatas pada kegiatan belajar mengajar, melainkan juga digunakan untuk sekedar bercengkrama, nongkrong, ruang rekaman untuk konten instagram Gerakan Surah Buku sendiri. Yang menarik adalah perubahan-perubahan dalam desain ruang tersebut, misalnya pemilihan warna dengan pencahayaan fokus, gambar dan coretan kata-kata pada dinding ruang kelas *surah buku*. Hal ini mencerminkan identitas perlawanan. Perhatikan misalnya gambar berikut, pistol yang bermuncung seekor burung yang sedang memuntahkan huruf-huruf.



Gambar 2. Mural di dinding kelas Gerakan Surah Buku

KESIMPULAN

Diaspora, Romantisme dan Perlawanan Kecil Kaum Muda

Gelombang diaspora karena kekacauan politik di tanah air atau kampung halaman dalam kasus Aceh tidak lagi memainkan peran penting. Gelombang baru diaspora ini lebih pada kepentingan pendidikan dan ekonomi. Dalam studi kasus yang saya angkat, rata-rata motif keberangkatan mereka meninggalkan kampung halaman untuk tujuan pendidikan. Namun manakala di rantau mereka kemudian menemukan bahwa apa yang mereka alami di masa lampau, atau cerita-cerita yang diwarisi dari kampung halaman, seperti konflik bersenjata yang menjadi bahan untuk mengartikulasikan aktivisme secara luas, dimana identitas mereka sebagai pemuda dan mahasiswa telah memungkinkan hal itu.

Bagaimana diaspora memainkan peran penting bagi tanah airnya dapat dilihat salah satunya dalam tulisan Nauja Kleist (2008). Ada dua argument yang ia tawarkan. Pertama, dia menunjukkan bahwa kategori identitas diaspora dibentuk dalam sebuah kontinum antara penderitaan, marginalisasi, dan atau ketidakmurnian moral di pengasingan, dan seruan dari sebuah komunitas yang berkomitmen secara transnasional, yang didedikasikan untuk pembangunan tanah air. Dan yang kedua, bahwa proliferasi klaim diaspora dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan masyarakat yang lebih luas di mana kelompok-kelompok migran dipandang sebagai aktor politik yang potensial.

Dalam kasus Gerakan Surah Buku, mereka menarasikan romantisme tersebut dalam istilah *surah*, hal tersebut sebagai mana saya tunjukkan sebelumnya, bahwa serangkaian acara ditandai dengan brand *surah*. Hal ini menjadi semacam pemebentukan identitas lokal disatu sisi dan membawa wacana yang tumbuh kembang di wilayah urban sebagai isinya. Hal ini bukan hanya telah membedakan dengan *surah kitab* di dayah-dayah lokal, melainkan juga telah menjadi identitas baru. Tentu kemudian ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan, sebagaimana saya cantumkan pada bagian sebelumnya, dimana desain ruang dan narasi kepedihan diucapkan, hal tersebut tentu bertujuan untuk mengingat dan melawan upaya-upaya untuk melupakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustamam-Ahmad, K. (2014). *Aceh baru post-tsunami: Merengkuh tradisi menuju masa depan mandiri* (Cetakan pertama). LSAMA ; Kaukaba.
- Cohen, R. (1996). Diasporas and the nation-state: From victims to challengers. *International Affairs*, 72(3), 507–520. <https://doi.org/10.2307/2625554>
- Djuli, M. N. (2018). *The long and winding road to Helsinki: Aceh dalam perang dan damai* (M. Juli & R. A. Affiat, Ed.; Cetakan pertama). Kawat Publishing.
- Hamzah, M. (2015). *Hasan Tiro: Jalan panjang menuju damai Aceh* (M. A. Abdullah, Ed.; Cetakan II). Bandar Publishing.
- Hirsch, A. Keller. (2016). *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca Konflik*. Pustaka Pelajar.
- Ishak, O. S. (2013). *Aceh pasca konflik: Kontestasi 3 varian nasionalisme*. Bandar Publishing.
- Kaya, K. (2002). Aesthetics of diaspora: Contemporary minstrels in Turkish Berlin. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 28(1), 43–62.
- Kleist, N. (2008). In the Name of Diaspora: Between Struggles for Recognition and Political Aspirations. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34(7), 1127–1143. <https://doi.org/10.1080/13691830802230448>
- Maulana, M. (2022). *Internalisasi Budaya Literasi Bagi Mahasiswa (Studi Kasus Gerakan Surah Buku di Yogyakarta)* [Draft skripsi, tidak diterbitkan].
- Missbach, A. (2011). The Acehnese diaspora after the Helsinki Memorandum of Understanding: Return challenges and diasporic post-conflict transformations. *Asian Ethnicity*, 12(2), 179–201. <https://doi.org/10.1080/14631369.2011.571836>
- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Munawwarah, R. (2020). *Komunikasi Persuasif Gerakan Surah Buku Dalam Menarik Minat Membaca Masyarakat*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Naafs, S., & White, B. (2012). Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89–106.
- Ruiz Herrera, L. N., & Bayat, A. (Ed.). (2010). *Being young and Muslim: New cultural politics in the global South and North*. Oxford University Press.
- Sari, M. (2022). HASAN TIRO: SEJARAH ACEH SEBAGAI PIJAKAN IDEOLOGI DALAM ACEH MERDEKA. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(1), 26–35. <https://doi.org/10.33373/hstr.v7i1.4297>

Crisis Management Inniciative diakses dari <https://cmi.fi/>, pada tanggal 23 Desember 2022.
<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/17/mou-helsinki-nasibmu-kini?page=all>
<https://www.aceh-moorden.com/2022/02/mou-helsinki-nasibmu-kini.html>